

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah utama yang masih dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk. Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 284 juta jiwa atau meningkat sebesar 3,27 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat berdampak pada meningkatnya beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatnya risiko masalah kesehatan ibu dan anak.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB), khususnya bagi Wanita Usia Subur (WUS). Program KB memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan reproduksi serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam meningkatkan *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) serta menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan bahwa AKB diharapkan mencapai 16 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024, sedangkan AKI ditargetkan menurun menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Namun demikian, capaian indikator tersebut masih belum optimal

dan masih memerlukan berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (Kemenkes RI, 2023).

Program KB di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1970 dan terbukti mampu menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR) dari sekitar 5–6 anak per wanita menjadi sekitar 2–4 anak. Salah satu metode kontrasepsi yang dianjurkan dalam program KB adalah MKJP karena memiliki efektivitas tinggi, jangka perlindungan yang lama, serta tingkat kegagalan yang relatif rendah. MKJP meliputi *Intra Uterine Device* (IUD) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), *implant*, Metode Operatif Wanita (MOW), dan Metode Operatif Pria (MOP). Meskipun demikian, penggunaan MKJP di Indonesia masih belum menjadi pilihan utama dibandingkan non-MKJP (Kemenkes RI, 2024).

Data nasional menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh non-MKJP. Berdasarkan laporan program Bangga Kencana tahun 2023, proporsi peserta KB aktif yang menggunakan MKJP berada pada kisaran 27–30%, sedangkan lebih dari 70% masih menggunakan non-MKJP (BKKBN, 2023). Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2022 yang dipublikasikan pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa metode suntik merupakan metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB di Indonesia.

Profil Kesehatan Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan metode kontrasepsi pada peserta KB aktif masih didominasi oleh non-MKJP. Metode suntik merupakan metode yang paling banyak digunakan dengan proporsi sekitar 42,3%. Sementara itu, penggunaan MKJP seperti AKDR/IUD sekitar 30,3%, implant sekitar 5,1%, Metode Operatif Wanita (MOW) sekitar 5,4%, dan

Metode Operatif Pria (MOP) sekitar 0,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemilihan metode kontrasepsi non-MKJP masih lebih dominan dibandingkan MKJP di Provinsi Bali (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2024).

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2024 menunjukkan bahwa penggunaan metode kontrasepsi pada peserta KB aktif di Kota Denpasar masih didominasi oleh metode kontrasepsi non-MKJP. Dari total 58.191 peserta KB aktif, sebanyak 19.087 peserta atau sekitar 32,7% menggunakan MKJP. Sementara itu, sebanyak 39.104 peserta atau sekitar 67,2% menggunakan metode kontrasepsi non-MKJP. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan metode kontrasepsi non-MKJP masih lebih tinggi dibandingkan MKJP di Kota Denpasar (BPS Provinsi Bali, 2024).

Pemilihan metode kontrasepsi merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang memiliki peran penting adalah tingkat pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman yang dapat membentuk sikap serta mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan pilihan kesehatan. Akseptor KB yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat, efektivitas, cara kerja, serta efek samping MKJP cenderung lebih rasional dalam menentukan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan dapat menimbulkan persepsi negatif, kekhawatiran, maupun kesalahpahaman terhadap MKJP.

Rendahnya pemilihan MKJP meskipun memiliki tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan program dan perilaku

pemilihan metode kontrasepsi di masyarakat. Oleh karena itu, aspek edukasi dan konseling menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman akseptor KB terhadap MKJP. Beberapa penelitian di Provinsi Bali menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memiliki hubungan dengan MKJP. Penelitian yang dilakukan oleh Artini (2023) di Kota Denpasar menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan wanita usia subur dengan penggunaan MKJP ( $p < 0,05$ ). Responden dengan tingkat pengetahuan yang baik memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam memilih metode IUD dan *implant* dibandingkan metode suntik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan Dewi (2023) di Kabupaten Badung menemukan bahwa rendahnya penggunaan MKJP dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai efektivitas serta kekhawatiran terhadap efek samping. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wanita usia subur dengan tingkat pengetahuan rendah lebih banyak memilih non-MKJP, terutama suntik, dibandingkan MKJP dengan nilai signifikansi  $p < 0,05$ .

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2024) di Kabupaten Gianyar juga menyatakan bahwa terdapat hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan dan dukungan tenaga kesehatan dengan pemilihan MKJP. Responden yang memperoleh konseling secara komprehensif mengenai MKJP memiliki kemungkinan lebih besar untuk menggunakan MKJP dibandingkan responden yang tidak memperoleh konseling secara optimal.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Putu dan Mahayani (2024) di Kabupaten Tabanan menunjukkan bahwa proporsi penggunaan MKJP masih lebih rendah dibandingkan metode suntik dan pil. Hasil analisis bivariat dalam penelitian

tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan pemilihan MKJP ( $p < 0,05$ ).

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam MKJP. Namun demikian, penggunaan MKJP di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di Bali masih belum optimal dan cenderung lebih rendah dibandingkan non-MKJP.

Berdasarkan data prevalensi penggunaan kontrasepsi modern di wilayah Denpasar Selatan, penggunaan MKJP sebesar 50,9%, sedangkan penggunaan metode kontrasepsi non-MKJP sebesar 48,9%. Data tersebut menunjukkan bahwa pemilihan metode kontrasepsi pada akseptor KB di wilayah Denpasar Selatan masih bervariasi antara metode MKJP dan non-MKJP. Variasi pemilihan metode kontrasepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan KB, termasuk pemberian konseling serta edukasi mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi kepada masyarakat. Melalui pelayanan tersebut diharapkan akseptor KB dapat memperoleh informasi yang tepat sehingga mampu memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Akseptor Keluarga Berencana di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin diteliti adalah: "Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dengan pemilihan MKJP pada akseptor KB di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan?".

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pemilihan MKJP pada akseptor KB di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan akseptor KB tentang MKJP di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan.
- b. Mengidentifikasi pemilihan MKJP pada akseptor KB di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan.
- c. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pemilihan MKJP pada Akseptor KB di UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi, khususnya kebidanan, mengenai hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pemilihan MKJP pada akseptor KB. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metode kontrasepsi.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi akseptor KB

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akseptor KB mengenai MKJP sehingga dapat membantu akseptor dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

### b. Bagi UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi UPTD Puskesmas IV Denpasar Selatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB, khususnya dalam pemberian konseling dan edukasi MKJP kepada akseptor KB.

### c. Bagi Tenaga Kesehatan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi bagi tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan promosi dan edukasi terkait pemilihan MKJP.

### d. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber kepustakaan bagi mahasiswa serta institusi pendidikan kesehatan dalam pengembangan ilmu kebidanan, khususnya yang berkaitan dengan program KB.

### e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan masyarakat mengenai MKJP, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat serta pentingnya penggunaan MKJP dalam perencanaan keluarga.